

Strategi Peningkatan Kinerja Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus di Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual)

Strategy for Enhancing the Performance of Marine and Fisheries Resources
Surveillance (Case Study at the Marine and Fisheries Resources Surveillance Base
in Tual)

Sigit Bintoro^{1✉}, Ety Riani², Nadiarti¹, Maman Rumanta³

¹Program Studi Magister Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka,
Jln. Cabe Raya, Pondok Raya, Pamulang, Tangerang Selatan, 15418

²Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, IPB University,
Jln. Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat, 16680

³Departemen Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka,
Jln. Cabe Raya, Pondok Raya, Pamulang, Tangerang Selatan, 15418

✉correspondent author: bintoro721022@yahoo.co.id

Abstrak

Efektivitas pengawasan merupakan faktor kunci dalam menjaga kelestarian sumberdaya serta mencegah tindakan ilegal yang merugikan negara. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan kinerja pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan di Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis utama, yaitu Analytic Hierarchy Process (AHP) dan SWOT, untuk mengidentifikasi serta memprioritaskan strategi yang paling relevan. Hasil AHP menunjukkan bahwa faktor sumberdaya manusia (SDM) memiliki bobot tertinggi (0.657), diikuti oleh infrastruktur dan sistem pengawasan (0.259), serta kebijakan (0.084). Berdasarkan analisis SWOT, strategi prioritas yang dihasilkan meliputi peningkatan kapasitas SDM dengan bobot 0.571, pengembangan sistem pengawasan dengan bobot 0.191, penguatan kerja sama dengan bobot 0.123, serta advokasi dan lobi kebijakan dengan bobot 0.114. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, mengurangi pelanggaran, serta mendukung keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Pangkalan PSDKP Tual

Kata kunci: Kinerja pengawasan, sumberdaya kelautan dan perikanan, AHP, SWOT, Pangkalan PSDKP Tual

Abstract

This study aims to formulate strategies to enhance the performance of marine and fisheries resource surveillance at the Marine and Fisheries Resources Surveillance Base (PSDKP) in Tual. The effectiveness of surveillance is a key factor in preserving resources and preventing illegal activities that harm the state. This research employs two main analytical approaches, the Analytic Hierarchy Process (AHP) and SWOT analysis, to identify and prioritize the most relevant strategies. The AHP results indicate that human resources (HR) have the highest weight (0.657), followed by infrastructure and surveillance systems (0.259), and policy (0.084). Based on the SWOT analysis, the prioritized strategies include enhancing HR capacity with a weight of 0.571, developing surveillance systems with a weight of 0.191, strengthening cooperation with a weight of 0.123, and advocating for policy and lobbying with a weight of 0.114. The implementation of these strategies is expected to improve surveillance effectiveness, reduce violations, and support the sustainability of marine and fisheries resources in the PSDKP Tual area.

Keywords: Surveillance performance, marine and fisheries resources, AHP, SWOT, PSDKP Tual

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan sumberdaya alam laut yang melimpah. Indonesia memiliki luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari laut teritorial 0,3 juta km², perairan kepulauan 2,95 juta km², dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,55 juta km² (Elisafira dan Usmaedi, 2023). Perairan laut Indonesia dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan estimasi jumlah potensi sumberdaya ikan (SDI) adalah sekitar 12,01 juta ton dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebanyak 8,6 juta ton pada seluruh WPP (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022). Sektor perikanan memegang peranan yang cukup penting sebagai sumber bahan pangan, penyediaan lapangan pekerjaan, rekreasi, perdagangan dan perekonomian negara, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (2018) menyebutkan bahwa kemampuan potensi perikanan di WPP 718 sebesar 2.637.565 ton. Selain itu Jumlah alokasi izin kapal yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbanyak berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI 718 yaitu sebanyak 1.368 unit. Tingginya aktivitas pemanfaatan tentunya memberikan dampak sehingga lingkungan laut di wilayah ini mengalami penurunan yang serius, terutama sebagai akibat dari pemanenan yang berlebihan dan dampak langsung dan tidak langsung lainnya dari tekanan antropogenik dan perubahan iklim global. Perikanan di wilayah ini mewakili sektor sosial ekonomi produktif yang sangat kompleks, dengan banyak pelaku, spesies target yang dicari, dan teknologi yang digunakan.

Namun, potensi besar ini sering kali tidak diimbangi dengan pengelolaan dan pengawasan yang efektif, sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), destruktif, dan tidak dilaporkan (IUU Fishing), serta degradasi lingkungan laut. IUU Fishing tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumberdaya laut (Febiana dan Agussalim, 2023). Praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) merupakan salah satu penyebab penurunan pengelolaan perikanan di WPP RI, kerusakan ekosistem perairan dan berkurangnya stok ikan di perairan Indonesia. Salah satu lembaga yang menangani pencegahan dan penindakan terhadap permasalahan ini adalah pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pangkalan PSDKP Tual merupakan salah satu UPT PSDKP yang berlokasi di Kota Tual, Provinsi Maluku dengan wilayah kerja pengawasan meliputi Provinsi Maluku,

Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya serta Provinsi Papua Selatan dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni : WPP 714 meliputi perairan Laut Banda, WPP 715 (meliputi perairan Laut Seram, Laut Halmahera dan Teluk Bintuni) dan WPP 718 meliputi Laut Aru dan Laut Arafuru. Wilayah ini dikenal memiliki potensi perikanan yang sangat besar, namun juga menghadapi tantangan pengawasan yang cukup kompleks. Untuk meningkatkan tugas dan fungsi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual, maka perlu dilakukan analisis kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Tual. Hapsari et al., (2013) menyebutkan bahwa permasalahan yang timbul dari kinerja pengawasan diidentifikasi berdasarkan beberapa faktor, yang meliputi sarana dan prasarana, tingkat pendidikan, insentif, dan motivasi.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan kinerja pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan di Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual.

Bahan dan Metode

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, mulai dari Juni – Agustus 2024. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual, Jalan Bukit Dumar No. 1 Kompleks PPN Tual, Kota Madya Tual, Provinsi Maluku 97611.

Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Nazir (1988) menyebutkan bahwa metode deskriptif kualitatif merupakan metode dalam menilai status kelompok manusia atau populasi suatu objek. Penelitian kualitatif akan menekankan pada aspek kualitas, yakni dalam mengukur keabsahan data dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari pihak internal dan eksternal Pangkalan PSDKP Tual. Data primer diperoleh melalui survei langsung di lapangan, wawancara, dan diskusi dengan pihak internal dan eksternal yang terkait dengan kinerja pengawasan oleh Pangkalan PSDKP Tual. Pihak internal Pangkalan PSDKP Tual adalah pejabat struktural, Ketua Tim Kerja, serta Pejabat

Fungsional bidang Pengawasan. Pihak eksternal adalah pemilik kapal, serta pelaku usaha kelautan.

Data internal Pangkalan PSDKP Tual yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain seperti gambaran umum Pangkalan PSDKP Tual, tugas dan fungsi, jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi, jumlah pelaku usaha kelautan yang diawasi, coverage area pengawasan, serta rekapitulasi tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik. Data eksternal yang dibutuhkan adalah informasi berupa aspek persepsi stakeholder terkait kinerja pengawasan oleh Pangkalan PSDKP Tual. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur ataupun studi pustaka terkait penelitian ini yang bersumber dari jurnal penelitian, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah stakeholder Pangkalan PSDKP Tual yang terdiri dari pengguna jasa dan pegawai Pangkalan PSDKP Tual. Sampel yang digunakan adalah pengguna jasa dari kegiatan aktivitas pengawasan perikanan yang termasuk dalam indikator/parameter yang mempengaruhi capaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual.

Sampel dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha yang memiliki kapal dengan izin pusat (ukuran >30 GT), pelaku usaha kelautan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual, serta Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Tual, dan Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Tual dengan total populasi sebanyak 150 orang.

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan cara perhitungan statistik menggunakan rumus *Slovin*. *Slovin* digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang representatif dari populasi yang telah diketahui jumlahnya agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Untuk tingkat kesalahan yang digunakan peneliti adalah sebesar 0,1 atau presisi 10% karena jumlah populasi kurang dari 1000. Rumus *Slovin* adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

- n : ukuran sampel/ jumlah responden
- N : ukuran populasi
- E : persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e=0,1 dengan tingkat kepercayaan 90%. Alasan digunakan error 10% adalah mengacu pada tingkat kesalahan maksimal yang dapat ditolerir pada penelitian ilmu sosial

Berdasarkan rumus *Slovin*, maka besarnya jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\n &= \frac{150}{1 + 150(0,1)^2} \\&= 60\end{aligned}$$

Dengan demikian, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 orang.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis utama, yaitu SWOT (David, 2012) dan Analytic Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1993), untuk mengidentifikasi serta memprioritaskan strategi yang paling relevan. Matriks SWOT (*Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats*) dapat membantu para pengambil keputusan institusi untuk menghasilkan alternatif strategi. Analisis kebijakan strategis dilakukan untuk menentukan strategi peningkatan kinerja pengawasan perikanan pada Pangkalan PSDKP Tual.

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan Perizinan Berusaha bidang Perikanan

Pengawasan Penangkapan Ikan

Kegiatan Pengawasan Penangkapan Ikan dilakukan terhadap kapal-kapal perikanan yang berpangkalan pada pelabuhan perikanan. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara pemeriksaan terhadap kapal perikanan pada saat kedatangan dan keberangkatan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor: 12/PER-DJPSDKP/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 23/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Laik Operasi Kapal Perikanan dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Tabel 1. Rekapitulasi HPK dan SLO selama tahun 2023 yang diterbitkan oleh masing-masing Satuan Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Tual

No	Lokasi (UPT/Satuan/Wilker PSDKP)	Izin Pusat (>30 GT)			Izin Pusat Migrasi (>6 - 30 GT)			Izin Provinsi (11-30 GT)			Izin Provinsi (≤10 GT)			Jumlah Total			% Laik	SKP SLO
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO		
		D	B		D	B		D	B		D	B		D	B			
1	PANGKALAN PSDKP TUAL	233	236	224	-	-	-	61	60	54	3	4	4	297	300	282	94,00	18
2	WILKER PSDKP DOBO	1.488	1.347	1.332	-	-	-	789	817	712	-	7	7	2.277	2.171	2.051	94,47	120
3	WILKER PSDKP WARABAL	23	25	24	-	-	-	-	3	1	-	-	-	23	28	25	89,29	3
4	SATUAN PSDKP SORONG	189	202	202	-	-	-	3.909	3.923	3.923	454	454	454	4.552	4.579	4.579	100,00	-
5	WILKER PSDKP SORONG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	WILKER PSDKP RAJAAMPAT	31	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	31	100,00	-
7	SATUAN PSDKP MERAUKE	106	114	108	1	10	10	1.100	1.115	1.107	-	2	2	1.232	1.250	1.236	98,88	14
8	WILKER PSDKP ASMAT	17	17	17	-	-	-	2	2	2	5	5	5	24	24	24	100,00	-
9	WILKER PSDKP WANAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SATUAN PSDKP KAIMANA	43	42	42	-	-	-	337	348	348	-	-	-	380	390	390	100,00	-
11	WILKER PSDKP FAKFAK	-	-	-	-	-	-	555	544	544	-	-	-	555	544	544	100,00	-
12	WILKER PSDKP WIMRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SATUAN PSDKP MIMIKA	431	508	430	-	-	-	61	100	158	-	-	-	492	608	588	96,71	20
14	SATUAN PSDKP MTB	30	35	35	-	-	-	122	137	134	19	29	29	171	201	198	98,51	3
15	WILKER PSDKP KISAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WILKER PSDKP BENJINA	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	100,00	-
	JUMLAH	2.594	2.559	2.447	1	10	10	6.936	7.049	6.983	481	501	501	10.037	10.128	9.950	98,24	178

Sumber : Laporan Tahunan Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa selama tahun 2023, Satuan dan Wilayah Kerja PSDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Tual telah menerbitkan 10.037 lembar HPK Kedatangan (HPK-D), 10.128 lembar HPK Keberangkatan (HPK-B), dan 9.950 lembar SLO dengan persentase 98,24% kapal perikanan dinyatakan laik operasi untuk melakukan kegiatan perikanan. Tingkat kelaikan kapal merupakan persentase yang menunjukkan perbandingan antara jumlah Surat Laik Operasi (SLO) dengan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan.

Pengawasan Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

Kegiatan pengawasan Unit Pengolahan Hasil Perikanan meliputi pengawasan terhadap kesesuaian dokumen perizinan, bahan tambahan makanan yang digunakan, bahan baku yang digunakan, dan produk olahan yang dihasilkan. Pengawasan unit pengolahan ikan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban akan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan ikut mengawal keamanan pangan khususnya pangan berbahan baku ikan. Selama tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual melaksanakan pengawasan terhadap 90 unit usaha pengolahan dan pemasaran ikan.

Pengawasan Bidang Usaha Pembudidayaan Ikan

Kegiatan pengawasan usaha pembudidayaan ikan di Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dilakukan sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor: 154/DJ-PSDKP/V/2010 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan. Pengawasan

dilakukan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen, penggunaan pakan dan obat selain itu juga dilakukan pendataan tentang jenis usaha, sistem budidaya, tenaga kerja serta lokasi usaha budidaya untuk pemetaan lokasi budidaya. Sebanyak 44 unit usaha pembudidaya ikan telah dilakukan pemeriksaan oleh Pangkalan PSDKP Tual.

Pengawasan Perizinan Berusaha bidang Kelautan

Pencapaian kinerja Tahun 2023 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 20 pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Dari sejumlah unit usaha tersebut, masih ada yang belum sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Terdapat 1 target yang ditetapkan dan telah terpenuhi. Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri, dimana PKKPRL adalah perizinan dasar, selama pelaku usaha memanfaatkan ruang laut. pengawasan PKKPRL erat kaitannya dengan pengawasan budidaya dan pengawasan perikanan lainnya sehingga kedudukan perizinan PKKPRL sangat penting diawasi untuk memastikan kelaikan dokumen lainnya.

Operasi Kapal Pengawas Perikanan

Kegiatan operasional kapal pengawas merupakan salah satu kegiatan Pengawasan di laut yang dilaksanakan oleh UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta Satwas dan Wilker Pengawasan SDKP di bawahnya. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh Kapal Pengawas dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan yang terdapat di unit pelaksana teknis seperti pada tabel 2 berikut :

Tabel 1. Lokasi dan ukuran kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual

No	Unit Kerja	Spesifikasi Kapal		Kondisi
		Nama Kapal	Ukuran Panjang Kapal	
1	Pangkalan PSDKP Tual	Dolphin 06	8 Meter	Rusak Berat (proses penghapusan) Sket tidak laik dari Kantor UPP Tual Nomor UM.001/161/6/K.UPP.TL15 tanggal 11 September 2015
		Albacore 002	16 Meter	Baik
		<i>Rigid Inflatable Boat</i>	8 Meter	Baik
		KP. Hiu Macan 006	36 Meter	Baik
		KP. Hiu 14	14 Meter	Baik
		Dolphin 12	8 Meter	Rusak Berat, Lokasi di Dobo
		Napoleon 26	12 meter	Rusak Berat, Lokasi di Dobo
		Napoleon 49	12 Meter	Baik, Lokasi di Warabal

No	Unit Kerja	Spesifikasi Kapal		Kondisi
		Nama Kapal	Ukuran Panjang Kapal	
2	Satwas PSDKP Merauke	Napoleon 44	12 meter	Mesin Rusak, Lokasi di Merauke
3	Satwas PSDKP Sorong	Napoleon 18	12 Meter	Baik
		Napoleon 042	12 meter	Baik, Lokasi di Raja Ampat
		<i>Rubber Boat</i>	-	Baik, Lokasi di Raja Ampat
4	Satwas PSDKP Kaimana	Napoleon 02	12 Meter	Rusak berat, Dikelola oleh dinas perikanan Kaimana kondisi mesin rusak.
		Napoleon 43	12 Meter	Baik, Lokasi di Kaimana
		Dolphin 25	8 Meter	Sudah dihibahkan ke Dinas Perikanan Kab. Fak - Fak
		Marlin 14	6 Meter	Baik, Lokasi di Kab. Fak- Fak
5	Satwas PSDKP Mimika	Napoleon 25	12 meter	Baik
6	Satwas PSDKP Maluku Tenggara Barat	Napoleon 50	12 Meter	Baik, Lokasi MTB

Sumber: Laporan Tahunan Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023

Dalam pelaksanaan kegiatan Gelar Operasi, Pengawas Perikanan di lingkup Pangkalan PSDKP Tual berdasarkan Surat perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Tual. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. Sasaran kegiatan ini adalah unit-unit kegiatan perikanan baik yang dilaksanakan perorangan maupun badan usaha yang meliputi kegiatan usaha penangkapan dan budidaya serta pengelolaan sumberdaya kelautan.

Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Selama kurun waktu tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual tidak memiliki penanganan terhadap tindak pidana kelautan dan perikanan, sehingga tidak terdapat capaian pada kegiatan dimaksud. Pangkalan PSDKP Tual justru hanya menyelesaikan 35 kasus sanksi administratif yang merupakan pelanggaran kapal perikanan sebanyak 34 kasus dimana 1 merupakan pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga total kasus yang selesai sebanyak 33 kasus untuk pelanggaran perikanan, sedangkan 1 kasus lainnya merupakan sanksi perizinan berusaha terhadap unit pengolahan ikan yaitu PT. Fuzhiyuan Aquatic Trading.

Strategi peningkatan kinerja Pengawas Perikanan

Identifikasi Faktor Internal dan eksternal

Faktor internal merupakan semua kondisi dan faktor yang berada di dalam jangkauan yang dapat dikontrol kewenangannya oleh Pangkalan PSDKP Tual yang mungkin dapat berfungsi sebagai kekuatan yang mana dapat mendukung dan mendorong peningkatan kinerja pengawasan atau sebagai kelemahan yang dapat menghambat pencapaian kinerja pengawasan oleh Pangkalan PSDKP Tual. Hasil identifikasi faktor internal yang mempengaruhi kinerja pengawasan oleh Pangkalan PSDKP Tual dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Penilaian faktor internal di Pangkalan PSDKP Tual

No.	Parameter	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan (<i>Strength</i>)				
1.	Fasilitas dan Infrastruktur memadai	0.18	4	0.72
2.	SDM Pengawas Perikanan memiliki kompetensi yang baik	0.16	3	0.49
3.	Pengawas memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidang kelautan dan perikanan	0.12	3	0.36
4.	Pengalaman dan rekam jejak yang baik dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	0.09	3	0.27
Kelemahan (<i>Weakness</i>)				
1.	Keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia yang memadai	0.16	2	0.33
2.	Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan	0.13	2	0.27
3.	Terbatasnya teknologi yang digunakan dalam pengawasan	0.15	2	0.30
Jumlah		1		2.73

Faktor eksternal merupakan semua kondisi dan faktor yang berada di luar jangkauan yang tidak dapat dikontrol kewenangannya oleh Pangkalan PSDKP Tual yang mungkin dapat berfungsi sebagai peluang yang mana dapat mendukung dan mendorong peningkatan kinerja pengawasan atau sebagai ancaman yang dapat menghambat pencapaian kinerja pengawasan oleh Pangkalan PSDKP Tual. Rangkuti (2013) menyatakan bahwa bobot dan rating dalam analisis SWOT sangat penting karena memberikan dimensi kuantitatif yang membantu dalam mengevaluasi dan memprioritaskan berbagai faktor yang mempengaruhi strategi.

Tabel 4. Penilaian faktor eksternal di Pangkalan PSDKP Tual

No.	Parameter	Bobot	Rating	Skor
Peluang (Opportunities)				
1.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat	0.16	4	0.63
2.	Kemungkinan Kerja sama dengan Lembaga Internasional atau NGO	0.10	4	0.39
3.	Perkembangan Teknologi	0.14	4	0.55
4.	Program dan Hibah Internasional	0.11	4	0.43
Ancaman (Threats)				
1.	Illegal Fishing dan Eksploitasi Laut	0.16	2	0.31
2.	Perubahan Kebijakan yang Tidak Mendukung	0.14	2	0.27
3.	Kondisi Alam yang Ekstrem	0.11	1	0.11
4.	Persaingan sumberdaya	0.10	1	0.10
Jumlah		1		2.79

Rekomendasi Strategi

Hasil analisis matriks SWOT untuk rekomendasi strategi dalam peningkatan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Tual. Hasil analisis tersebut terangkum dalam matriks analisis SWOT seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks analisis SWOT

Faktor Internal	Kekuatan (Strengths – S) 1. Fasilitas dan Infrastruktur memadai 2. SDM Pengawas Perikanan memiliki kompetensi yang baik 3. Pengawas memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidang kelautan dan perikanan. 4. Pengalaman dan rekam jejak yang baik dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.	Kelemahan (Weakness – W) 1. Keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia yang memadai. 2. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. 3. Terbatasnya teknologi yang digunakan dalam pengawasan.
Faktor Eksternal	Strategi (SO) 1. Memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta kompetensi SDM 2. Menggunakan pengetahuan khusus dan pengalaman yang baik 3. Penguatan Kerja sama dengan Komunitas Lokal 4. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Canggih	Strategi (WO) 1. Mengatasi keterbatasan anggaran 2. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM 3. Pengembangan Teknologi Pengawasan Sederhana dan Efektif 4. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Aliansi Strategis
Peluang (Opportunities) 1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat 2. Kemungkinan Kerja sama dengan Lembaga Internasional atau NGO 3. Perkembangan Teknologi 4. Program dan Hibah Internasional	Strategi (ST) 1. Menggunakan fasilitas yang memadai dan keahlian khusus 2. Mengoptimalkan pengalaman dan rekam jejak yang baik 3. Pengembangan Sistem Pengawasan Terpadu 4. Advokasi dan Lobi Kebijakan	Strategi (WT) 1. Mengatasi keterbatasan anggaran dan SDM 2. Mengurangi ketergantungan pada teknologi yang terbatas 3. Penyusunan Program Pengembangan SDM Secara Mandiri 4. Mitigasi Risiko Perubahan Kebijakan
Ancaman (Threats – T) 1. Illegal Fishing dan Eksploitasi Laut. 2. Perubahan Kebijakan yang Tidak Mendukung. 3. Kondisi Alam yang Ekstrem 4. Persaingan Sumberdaya		

Pemilihan Prioritas Strategi Menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP)

Metode AHP menggunakan bentuk hierarki dalam memecah masalah yang kompleks menjadi masalah yang terstruktur dengan *input* utamanya merupakan persepsi manusia. Pada tahap ini dilakukan penetapan kriteria faktor yang mempengaruhi proses peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual berdasarkan hasil analisis SWOT dan rekomendasi kebijakan sebagai alternatif yang akan dibentuk dalam suatu struktur hierarki (Saaty 1993; Saaty 1997). Struktur hierarki terdiri dari tiga level, yaitu pada level pertama (Level 0) merupakan tujuan (*goal*) yang ingin dicapai, level kedua (Level 1) yaitu kriteria faktor, dan level terakhir (level 2) yaitu alternatif – alternatif strategi dalam peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, didapatkan empat faktor yang tepat sebagai penilaian untuk keberhasilan peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual. Faktor – faktor tersebut adalah :

- Infrastruktur (Sarana dan Prasarana, Teknologi Pengawasan)
- Sumberdaya Manusia
- Kebijakan

Alternatif Kebijakan Rencana Aksi

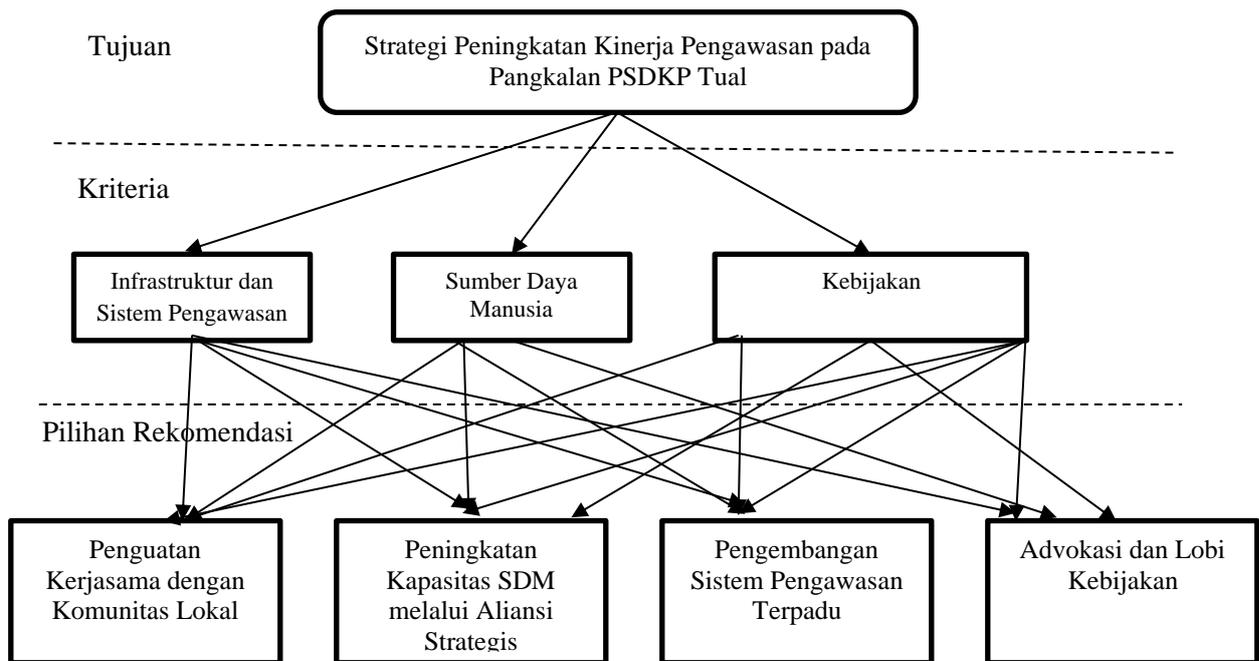
Alternatif kebijakan rencana aksi menggambarkan suatu rumusan strategi sebagai alternatif solusi dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual. Hasil perumusan alternatif strategi, diperoleh 4 (empat) alternatif yang dapat dijadikan prioritas untuk mendukung peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual yaitu:

1. Penguatan Kerja sama dengan Komunitas Lokal: Melibatkan komunitas lokal sebagai mitra strategis sangat penting untuk keberlanjutan dan efektivitas pengawasan sumberdaya kelautan. Ini juga mendukung kesadaran masyarakat yang meningkat sebagai peluang besar.
2. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Aliansi Strategis: Mengingat keterbatasan anggaran dan pentingnya pengembangan kompetensi, strategi ini menjadi prioritas untuk memastikan SDM memiliki keahlian yang memadai melalui pelatihan dan kerja sama strategis.

3. Pengembangan Sistem Pengawasan Terpadu: Mengintegrasikan berbagai teknologi dan metode pengawasan dalam satu sistem akan memberikan respons yang lebih efektif terhadap ancaman seperti *illegal fishing* dan kondisi alam ekstrem.
4. Advokasi dan Lobi Kebijakan: Penting untuk mempengaruhi kebijakan publik agar mendukung pengawasan yang lebih kuat. Strategi ini penting untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung dalam jangka panjang.

Pembentukan Struktur Hierarki

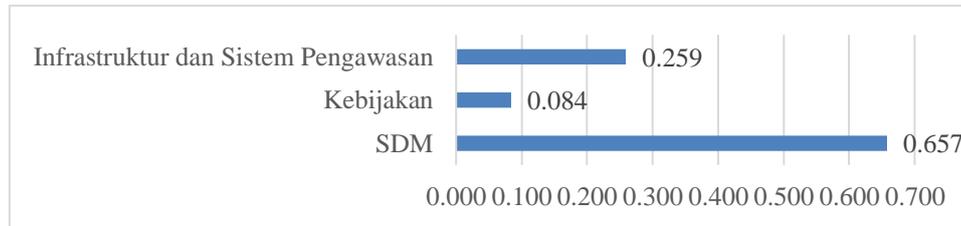
Struktur hierarki strategi rencana aksi peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur hierarki strategi peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual

Pemilihan Prioritas Strategi

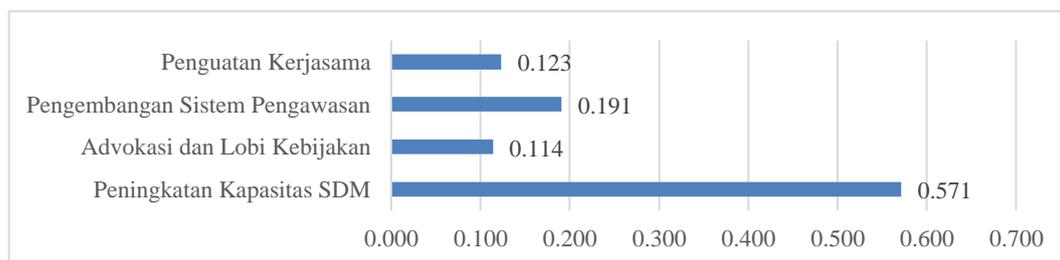
Analisis rekomendasi strategi peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual didasarkan pada 3 (tiga) faktor yang didapat dari hasil analisis SWOT. Ketiga faktor tersebut diantaranya : infrastruktur dan sistem pengawasan, sumberdaya manusia, serta kebijakan. Hierarki Rekomendasi strategi peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual ditampilkan pada Gambar 1. *Output* AHP tentang perbandingan antar faktor yang mempengaruhi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. *Output* hasil analisis perbandingan antar faktor

Hasil analisis terhadap tiga kriteria faktor tersebut menunjukkan bahwa aspek SDM memiliki kepentingan yang tinggi dengan rasio 0,657. Selanjutnya berturut turut adalah infrastruktur dan sistem pengawasan dengan rasio 0,259 dan kebijakan sebesar 0,084. Hasil analisis tersebut memiliki rasio inkonsistensi sebesar 0,09 yang berarti data yang direkap berdasarkan pendapat pakar dipandang konsisten. Fitria (2013) menyebutkan bahwa penilaian perbandingan berpasangan tergolong konsisten jika nilai indeks konsistensinya kurang dari 0,1, dan jika nilai indeks konsistensinya lebih dari 0,1 maka matriks perbandingan berpasangan perlu dibuat ulang.

Kriteria SDM memiliki nilai rasio kepentingan yang paling besar dibandingkan infrastruktur dan sistem pengawasan. Hal ini disebabkan karena mayoritas responden merupakan pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang menilai bahwa pemenuhan kompetensi SDM serta kebutuhan SDM pengawas merupakan hal yang vital dalam peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual. *Output* AHP tentang pilihan rekomendasi strategi peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. *Output* hasil analisis pilihan rekomendasi strategi rencana aksi

Analisis mengenai hasil analisis AHP untuk menentukan prioritas strategi peningkatan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual menunjukkan urutan prioritas berdasarkan bobot kepentingan masing-masing strategi.

Peningkatan Kapasitas SDM (0.571)

Bobot tertinggi sebesar 0.571 pada peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) menunjukkan bahwa strategi ini merupakan prioritas utama dalam peningkatan kinerja pengawasan. Peningkatan kapasitas SDM mencakup pelatihan, pendidikan, serta pengembangan keterampilan personel yang terlibat dalam pengawasan. SDM yang lebih kompeten dan terlatih akan mampu melaksanakan tugas pengawasan dengan lebih efektif dan efisien, serta beradaptasi dengan berbagai tantangan dan perubahan dalam lingkungan pengawasan. Investasi dalam peningkatan kapasitas SDM juga memungkinkan peningkatan kualitas pengambilan keputusan, kemampuan analitis, dan responsivitas terhadap situasi di lapangan.

Pengembangan Sistem Pengawasan

Pengembangan sistem pengawasan menempati urutan kedua dalam prioritas strategi yaitu dengan nilai bobot 0.191. Ini mencakup pembaruan dan peningkatan sistem teknologi informasi, prosedur, serta metode yang digunakan dalam proses pengawasan. Sistem pengawasan yang lebih baik dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam deteksi pelanggaran, pemantauan aktivitas, dan pelaporan. Sistem yang modern dan terintegrasi juga memungkinkan pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mendukung upaya pencegahan pelanggaran.

Penguatan Kerja sama

Penguatan kerja sama mendapat bobot 0.123, mengindikasikan pentingnya kolaborasi dalam strategi peningkatan kinerja pengawasan. Kerja sama ini dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat lokal. Dengan memperkuat kerja sama, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik dalam pelaksanaan pengawasan, termasuk dalam hal berbagi informasi, sumberdaya, dan keahlian. Kerja sama yang kuat juga dapat membantu mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam proses pengawasan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Advokasi dan Lobi Kebijakan

Advokasi dan lobi kebijakan, dengan bobot 0.114, merupakan komponen strategi yang juga penting namun memiliki prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Advokasi dan lobi bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung penguatan pengawasan, termasuk penguatan regulasi, alokasi anggaran, dan dukungan politik. Melalui advokasi yang efektif, diharapkan kebijakan yang diterapkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan pengawasan, serta mendukung pencapaian tujuan pengawasan secara lebih holistik dan berkelanjutan.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Tual masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Analisis menunjukkan bahwa faktor sumberdaya manusia (SDM) memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kinerja pengawas, dengan bobot tertinggi. Faktor infrastruktur dan sistem pengawasan, serta kebijakan, juga mempengaruhi kinerja meskipun dengan bobot yang lebih rendah. Oleh karena itu, strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja pengawasan di Pangkalan PSDKP Tual adalah peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem pengawasan, penguatan kerja sama antar lembaga, serta advokasi dan lobi kebijakan.

Daftar Pustaka

- Elisafira dan Usmaedi, 2023. Politik Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti. *Kala Manca: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11 (1): 1-10.
- David FR. 2012. Strategic Management Konsep. Buku 1. Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat.
- Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, 2018. Laporan Kinerja. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Fitria 2013. Analytic Hierarchy Process Metode Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Pada Koperasi Mandiri Utama. *Jurnal Informatika* 13(1). 10-22.
- Febiana R dan Agussalim Burhanuddin. 2023. Implementasi Kebijakan Sekuritisasi Maritim Presiden Jokowi Dalam Menghadapi Aktivitas Ilegal Di Perairan Indonesia. *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime* 4 (2): 85-98.
- Hapsari, D.I., Rosyid, A., dan Hapsari, T.D. (2013). Analisis Kinerja Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan ratu Sukabumi Jawa Barat. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 2(1), 95-103.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2020. Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2022. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang estimasi potensi sumberdaya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia. <http://jdih.kkp.go.id>. (02/2023).
- Nazir M. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia
- Rangkuti F. 2013. SWOT–Balanced Scorecard. Gramedia Pustaka Utama.
- Saaty TL. 1977. A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures. *Journal of Mathematical Psychology* 15 : 234-281.
- Saaty TL. 1977. A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures. *Journal of Mathematical Psychology* 15 : 234-281.

Saaty TL. 1993. Pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Terjemahan Oleh Lina S. 1986. Decision Making For Leader : The Analitical Hierarchi Process For Decision Complex World. Edisi Bahasa Indonesia. (Terjemahan Oleh Ir. Lina S.), Pt. Pustaka

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.